



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/Tanggal	: Selasa, 30 Juni 2020
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan Subsidi Energi BBM dan Gas
Ketua Rapat	: Marwan Cik Asan
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E., M.Si
Hadir Pimpinan	: 3 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI
Hadir Anggota	: 3 dari 6 Anggota BAKN DPR RI
Hadir Tamu	: Ketua Hiswana Migas beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Konsultasi BAKN DPR RI dengan Hiswana Migas dipimpin oleh Ketua BAKN, Marwan Cik Asan, dibuka pada pukul 13.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini adalah dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan Subsidi Energi BBM dan Gas.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Ketua Hiswana Migas menyampaikan paparannya terkait dengan peran Hiswana Migas dalam rangka pendistribusian BBM dan gas bersubsidi di Indonesia.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pimpinan dan anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pimpinan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

Berdasarkan hasil konsultasi antara BAKN dan Hiswana Migas terkait Subsidi Energi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengurangi kelangkaan BBM dan LPG pada saat mendekati hari besar keagamaan, maka Hiswana Migas membentuk Satgas untuk memastikan kecukupan kebutuhan BBM dan LPG, khususnya di Pulau Jawa.
2. Dalam menghadapi Covid-19, Hiswana Migas tetap melakukan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia meskipun omset pada SPBU turun hingga 70%.
3. Kesulitan yang dihadapi Hiswana Migas saat ini adalah adanya perbedaan harga di beberapa daerah. Perbedaan harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan non subsidi menimbulkan tindakan ilegal oleh oknum tertentu seperti adanya pengoplosan BBM. Langkah yang diambil oleh Hiswana Migas antara lain memperjelas penerima subsidi dan disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi diperkecil.
4. Sehubungan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), Hiswana Migas mewajibkan di setiap pangkalan untuk mencantumkan harga eceran tertinggi.
5. Pola distribusi BBM dan LPG di Indonesia saat ini sudah cukup baik. Akan tetapi karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan maka ada beberapa yang letak geografisnya cukup jauh / terpencil akan sedikit mengalami kesulitan.

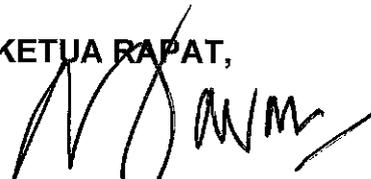
Adapun terkait dengan bahan masukan yang telah diberikan Hiswana Migas selanjutnya akan dijadikan bahan penelaahan BAKN DPR RI terkait subsidi energi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 30 Juni 2020

KETUA RAPAT,



MARWAN CIK ASAN

A-535